PENYERAPAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Agus Sunarya Sulaeman, Andy Prasetiawan Hamzah, Rame Priyanto
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jalan Bintaro Raya Sektor V, Tangerang Selatan
Email: asunarya@gmail.com

ABSTRACT

The budget absorption was one of The Ministry of Finance's Key Performance Indicators. In 2010, its realization had not met the target set. This research aimed to determine the budget absorption in The Ministry of Finance and the factors that influenced it. This research applied analytical descriptive method to describe the findings in the study, and then a hypothesis testing was applied. Hypothesis testing was carried out on suspected variables that affected budget absorption, with the hypothesis Ho: Sample (variable) was not sufficient for further analysis; H1: The sample (variable) was sufficient for further analysis. Then, the variables that were sufficient for further analysis will be assessed by using a model $y_i = x_i'\beta + \varepsilon_i$ where y_i is the budget absorption and x_i is the independent variable. The results showed that the budget absorption in the work unit within the Ministry of Finance had not been optimal. The Factors that influenced it were the poor planning, the implementation which was not on schedule, the implementation procedures that hampered, and the lack of coordination among relevant agencies. Hypothesis test of the operational variables showed that all the variables were suitable for further analysis. The effect of operational variables on the budget absorption could be estimated by using the model: $Absorptio_n = -0.116 * Struktural_i - 0.165 * Perf_i + 0.335 * Plan_i + 0.054 * Otoritas_i$ Variable of activity plan (Plan), variable of structural and systemic weaknesses (structural), and variable of performance and coordination with other agencies (Perf) had a significant effect, while the variable of budget authority (Authority) had no significant effect. The Structural Variable and Perf Variable had negative effect, while the Plan Variable and Authority Variable had positive effect. Based on the result, to optimize the budget absorption, the government was recommended to make priority improvements on the four variables and their indicators. Other researchers were recommended to research other agencies and to use more detail variables.

Keywords: The Budget Absorption, Structural, Policy, Budget Authority, Planning

ABSTRAK

Penyerapan anggaran merupakan salah satu IKU Kementerian Keuangan. Tahun 2010, realisasinya belum memenuhi target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menerapkan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan temuan dalam penelitian, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan terhadap variabel yang diduga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan hipotesis Ho : Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut; H1 : Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya variabel yang memadai akan ditaksir dengan menggunakan model $y_i = x_i'\beta + \varepsilon_i$ dimana y_i adalah Serapan Anggaran dan x_i adalah Variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan penyerapan anggaran di satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan belum optimal. Faktor yang berpengaruh adalah perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal, prosedur pelaksanaan yang menghambat, dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Uji Hipotesis terhadap variabel operasional penelitian menunjukkan bahwa semua variabel memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Pengaruh variabel operasional terhadap penyerapan anggaran dapat ditaksir dengan menggunakan model: $Serapan_i = -0.116 * Struktural_i - 0.165 * Perf_i + 0.335 * Plan_i + 0.054 * Otoritas_i$ Variabel perencanaan kegiatan (Plan), variabel kelemahan struktural dan sistemik (Struktural) dan variabel kinerja dan koordinasi dengan instansi lain (Perf) berpengaruh signifikan, sedangkan variabel otoritas anggaran (Otoritas) tidak berpengaruh signifikan. Variabel Struktural dan Variabel Perf berpengaruh negatif, sedangkan variabel Plan dan Variabel Otoritas berpengaruh Positif. Berdasarkan analisis penelitian untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, disarankan ke pemerintah untuk melakukan prioritas perbaikan pada ke empat variabel beserta indikator-indikator yang membentuknya. Sedangkan untuk peneliti lain disarankan untuk meneliti instansi lain dan menggunakan variabel-variabel yang lebih mendetail.

Kata Kunci : Penyerapan Anggaran, Struktural, Kebijakan, Otoritas Anggaran, Perencanaan.

1. PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya tiga paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelum diterbitkannya tiga paket undang-undang tersebut. Ketiga paket undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara. Penyerapan anggaran di setiap

anggaran yang rendah, meskipun beberapa K/L mencapai realisasi yang tinggi. Capaian realisasi beberapa K/L disajikan dalam tabel 1.1

Penyerapan anggaran berhubungan dengan kinerja anggaran dan merupakan kemampuan Kementerian/Lembaga dalam menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Penyerapan anggaran berhubungan dengan penyediaan, pembagian, dan kewajiban yang bersifat dinamis dari sumber daya keuangan.

Penganggaran Berbasis Kinerja mensyaratkan adanya Indikator Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Indikator Kinerja Kementerian Keuangan disusun berdasarkan Peta Strategi dan Sasaran Strategis dan dibagi menjadi 4 perspektif.

Tabel 1.1 Realisasi Penyerapan Anggaran di Beberapa Kementerian/Lembaga

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	REALISASI (%)
1.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	76,00
2.	Mahkamah Agung (MA)	74,7
3.	Kementerian Luar Negeri	67,4
4.	Kementerian ESDM	69,3
5.	Kementerian BUMN	55,8
6.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)	64,8
7.	PPN/Bappenas	67,4
8.	Kementerian Kominfo	76,1
9.	Kementerian Keuangan	84,4

Kementerian/Lembaga (KL) termasuk Kementerian Keuangan merupakan prioritas penting yang harus dibenahi. Berbagai data yang menyebutkan bahwa adanya sisa anggaran yang tidak terserap setiap tahun menunjukkan perlu adanya suatu perbaikan di dalam proses penyerapan anggaran tersebut. Tahun 2010, seperti disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan beberapa K/L mempunyai capaian realisasi

Terkait anggaran, sasaran strategis Kementerian Keuangan adalah Pengelolaan Anggaran yang optimal. Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran. Masih dimasukkannya penyerapan sebagai IKU Kementerian Keuangan ini menjadikan penelitian ini masih relevan untuk dijadikan objek penelitian.

Selain alasan tersebut di atas, Tim Penelitian terdorong untuk melakukan penelitian ini karena penelitian terkait dengan penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan memberikan suatu gambaran penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran tersebut. Penelitian ini tidak akan membahas perhitungan angka-angka terkait dengan besaran penyerapan anggaran tetapi lebih kepada mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penyerapan anggaran yang terjadi berapapun besarnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan dikelompokkan dalam variabel operasional penelitian yaitu Permasalahan Kelemahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian, Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor atau Kementerian Lain, Perencanaan Kegiatan, Serapan Anggaran, Sistem dan Otoritas Anggaran. Variabel operasional tersebut digunakan untuk menaksir pengaruh kelemahan struktural internal, koordinasi, dan sistem anggaran terhadap serapan anggaran, dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$y_i = x_i' \beta + \varepsilon_i$$

Di mana :

y_i = Serapan Anggaran

x_i = Variabel bebas

Pengujian hipotesis akan menggunakan uji t-statistik dan pengujian F-statistik untuk menguji pengaruh variabel. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah variabel memadai untuk dianalisis lebih lanjut atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah:

Ho : Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut

H1: Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut

Kriteria dengan melihat probabilitas (signifikan):

p-value > 0.05 Ho tidak ditolak

p-value < 0.05 maka Ho ditolak

2. TUJUAN PENELITIAN

Dari latar belakang yang telah teridentifikasi maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui bagaimana penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

3.1 Anggaran Berbasis Kinerja

Glenn A Welsch mendefinisikan anggaran sebagai berikut:

"Profit planning and control may be broadly as defined as systematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management".

Dari pengertian di atas, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Menurut Gomes (1995, p.87-88), anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan.

Penganggaran berbasis kinerja

merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

3.2 Penyerapan Anggaran.

Sejak tahun 2005 sesuai amanat UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, telah dilakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih, dimana tidak membedakan lagi antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal. Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut dalam UU No. 17/2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

3.3 Permasalahan Penyerapan Dana

Menteri PPN/ Kepala Bappenas dalam Rapat Kerja Presiden RI dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 6 Agustus 2010 di Istana Bogor menjelaskan, untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran akan dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran, antara lain melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perbaikan peraturan/ketentuan/*Standard Operating Procedures* (SOP) tentang penganggaran, antara lain:
 - a. Amendemen Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Ketentuan untuk aturan multiyears contract dan penunjukan pejabat perbendaharaan K/L yang tidak perlu setiap tahun.
 - b. Akan segera disusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Waktu Penyelesaian SPP dan SPM oleh K/L yang diarahkan selesai dalam 12 hari.
 - c. Akan dilakukan pengintegrasian proses administrasi SAPSK dan DIPA mulai Tahun Anggaran 2011.
2. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme para pejabat perbendaharaan, akan ditingkatkan insentif bagi mereka.
3. Revisi terhadap Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Peningkatan pelatihan SDM K/L untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, penganggaran, dan pengadaan (termasuk penyusunan Procurement Plan dan *Disbursement Plan*, penyusunan TOR dan *Feasibility Study*).
5. Peningkatan sosialisasi berbagai

peraturan, ketentuan dan SOP tentang perencanaan, penganggaran dan pengadaan, antara lain:

- (a) Sosialisasi Revisi Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- (b) Sosialisasi Pemrosesan SP2D oleh Ditjen Perbendaharaan yang sudah distandarkan selesai dalam waktu 1 jam;
- (c) Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang Komprehensif.

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan suatu Kementerian/Lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada. Masalah penyerapan anggaran dapat terjadi di berbagai negara dengan penyebab yang berbeda-beda. Manasan dan Mercado (2001) menganalisis bahwa sedikitnya ada 3 sumber penyebab rendahnya penyerapan anggaran di suatu Kementerian/Lembaga pemerintah:

1. Faktor-faktor yang berasal dari kelemahan struktural dan sistemik Kementerian/Lembaga
2. Faktor-faktor yang berasal dari sistem penganggaran
3. Faktor yang berasal dari kesalahan koordinasi dengan berbagai sektor atau institusi.

3.3.1 Faktor-faktor yang berasal dari kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian/lembaga tersebut

Faktor-faktor yang dianggap berasal dari kelemahan struktural dan sistemik diantaranya:

1. *Right of Way Acquisition* (ROWA) yaitu

permasalahan *agency (agency problem)* internal dan permasalahan *agency* di dalam koordinasi antar Kementerian/Lembaga.

2. *Bidding, contract*, dan *procurement*.
3. Perubahan rancangan proyek *variation orders*.
4. Pemenuhan syarat-syarat dokumen.
5. Permasalahan monitoring dan evaluasi.
6. Permasalahan berhubungan dengan isu-isu kinerja *Project Management Offices* (PMO).

3.3.2 Faktor-faktor yang berasal dari sistem penganggaran

Permasalahan yang berasal dari sistem penganggaran yang mempengaruhi penyerapan anggaran ialah keterlambatan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau bagian yang mengelola anggaran di Kementerian/Lembaga terkait. Lebih lengkap isu-isu terkait dengan sistem anggaran yaitu:

1. Manajemen pengeluaran: Manajemen pengeluaran cash dan ketepatan proyeksi pendapatan.
2. Adanya kegiatan tambahan dari anggota legislatif yang mungkin tidak perlu.

3.3.3 Faktor-faktor yang berasal dari permasalahan koordinasi dengan berbagai sektor.

Berkaitan dengan permasalahan koordinasi dengan berbagai sektor dan institusi maka muncul beberapa isu, di antaranya:

1. Permasalahan ROWA, menyangkut valuation dan judicial process atau court injunctions.
2. Sinkronisasi, pelengkap, dan koordinasi proyek dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

3.3.4 Faktor lain

Faktor lain yang diduga berhubungan dengan penyerapan anggaran ini ialah perencanaan kegiatan yang baik (lihat World Bank, 1998). Perencanaan kegiatan yang baik akan berhubungan dengan perencanaan kas yang akurat sehingga daya serap anggaran bisa diprediksi dan jika ada perubahan dapat segera disesuaikan.

IV KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini penting karena akan bermanfaat bagi Kementerian Keuangan baik di pusat maupun daerah berkaitan dengan pelaksanaan/kondisi penyerapan anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat mencari alternatif penyelesaian dalam setiap permasalahan tersebut.

V. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan data primer dari hasil survei terhadap para pegawai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah. Adapun rancangan penelitian yang digunakan ialah seperti terlihat dalam tabel 5.1:

5.1 Metode Yang Digunakan

Ditinjau dari sasaran yang ingin dicapai, penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif-analitis. Unit analisis ialah para pegawai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia baik di pusat maupun daerah serta masyarakat pengguna. Adapun sampel Kementerian Keuangan di daerah akan diambil dari beberapa instansi vertikal Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia.

5.2 Operasionalisasi Variabel

Mengacu pada model Svensson (2006) dan Manasan dan Mercado (2001) serta menyesuaikan dengan proyek kerja Kementerian Keuangan, dapat digambarkan operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut

5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sesuai dengan pendapat Uma Sekaran (2003:29-54), yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini akan menggunakan salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan metode pengumpulan data primer dengan cara penyebaran kuesioner.

5.4 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara mengestimasi model penelitian yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis terhadap hasil dari estimasi model tersebut. Dari hasil pengujian hipotesis, bisa ditarik kesimpulan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Uji validitas dan reliabilitas akan dilakukan untuk data hasil kuesioner agar tidak menimbulkan hasil yang bias pada saat kita menggunakannya dalam analisis lanjutan. Metode pengujian tersebut menggunakan path analysis atau analisis jalur.

5.5 Metode Analisis Faktor

Analisis faktor akan menguji bagaimana keeratan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikator yang membentuknya. Analisis komponen utama digunakan jika tujuannya untuk mendapatkan informasi (*varians*) yang asli ke dalam sejumlah faktor minimum untuk

Tabel 5.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variable	Sub Variabel	Indikator	Skala
Permasalahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian/Lembaga Tersebut	Kelemahan <i>Bidding, Contract, and Procurement</i>	Lamanya proses <i>bidding, contract</i> , dan pengadaan barang, jasa, dan kegiatan	Ordinal
		Proses <i>bidding, contract</i> , dan pengadaan barang, jasa, dan kegiatan	
	<i>Design Changes/Variation Orders</i>	Waktu keluarnya <i>design</i> kegiatan/proyek	Ordinal
		Perubahan <i>design</i> kegiatan/proyek	
	Kelengkapan Persyaratan Dokumen	Lamanya persetujuan <i>design</i> kegiatan/proyek	Ordinal
		Persiapan pembuatan <i>design</i> kegiatan/proyek	
Permasalahan Evaluasi	Monitoring dan	Pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan	Ordinal
		Waktu untuk pemenuhan kelengkapan dokumen	
Permasalahan Offices (PMO)	<i>Project Management</i>	Efektivitas dan efisiensi dalam monitoring	Ordinal
		Kompleksitas dan beban isian monitoring	
Permasalahan Kebijakan, kinerja dan koordinasi dengan sektor atau Kementrian/Lembaga lain	<i>Project Management</i>	Permasalahan <i>incentive (reward)</i> dan <i>punishment</i>	Ordinal
		Permasalahan struktur organisasi	
Permasalahan Sistem dan Otoritas Anggaran	Manajemen Pengeluaran Dana	Rencana kegiatan yang tidak konsisten	Ordinal
		Sinkronisasi, Kelengkapan, dan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain	
Perencanaan Kegiatan	Kegiatan Tambahan dari Anggota Legislati	Sinkronisasi antar kegiatan yang buruk	Ordinal
		Koordinasi kegiatan dengan Kementerian/Lembaga terkait yang buruk	
Serapan Anggaran	Besar serapan dan <i>Timing</i>	Permasalahan waktu pengeluaran dana	Ordinal
		Permasalahan pembagian pengeluaran dana antar waktu	
Serapan Anggaran	Besar serapan dan <i>Timing</i>	Permasalahan proyeksi penerimaan	Ordinal
		Tambahan kegiatan dari anggota DPR	
Serapan Anggaran	Besar serapan dan <i>Timing</i>	Sistem yang tidak mendukung kegiatan tambahan anggota DPR	Ordinal
		Perencanaan kegiatan sebagai pedoman	
Serapan Anggaran	Besar serapan dan <i>Timing</i>	Besarnya serapan anggaran sangat tergantung pada kegiatan yang telah direncanakan	Ordinal
		Serapan anggaran dapat berubah jika terjadi perubahan kegiatan/program	
Serapan Anggaran	Besar serapan dan <i>Timing</i>	Besaran serapan anggaran	Ordinal
		Besaran serapan anggaran <i>Timing</i> serapan anggaran	

tujuan prediksi. Sebaliknya, analisis faktor terutama digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar-belakanginya (*underlying factor*) atau dimensi yang tidak mudah dikenal. Lebih jelas lagi, berikut ini model analisis faktor. Misalkan, diketahui vektor acak x berukuran px_1 yang rata-rata

μ , dan matriks kovarians Σ . Model analisis faktor mempostulatkan bahwa x bebas linier terhadap beberapa variabel acak yang tidak teramati $F_1, \dots, F_m$ disebut *common factors*, dan sumber variasi $\epsilon_1, \dots, \epsilon_p$ yang dikenal sebagai error atau disebut juga *specific factors*. Model analisis faktor diberikan sebagai berikut :

$$x = \pi F + \varepsilon$$

$$(px1) \quad (pxm) \quad (mx1) \quad (px1)$$

Note: π disebut matriks loading faktor

Kriteria umum untuk menentukan jumlah faktor yang sering digunakan adalah dengan akar laten atau *eigen value*. Aturannya, jika nilai eigenvalue lebih dari satu, maka faktor tersebut dipertahankan. Jika nilai eigenvalue kurang dari satu, maka faktor tersebut tidak dipertahankan. Kriteria ini digunakan jika banyaknya variabel antara 20 sampai 50.

Analisis faktor juga sering menghitung reliabilitas suatu konstruk atau konsep (*construct reliability*) yang diberikan oleh (Hair, et.al, 1992):

$$\text{Construct reability} = \frac{(\sum \text{std loading})^2}{(\sum \text{std loading})^2 - (\sum \text{var}) \lambda}$$

Di mana *std. loading* adalah *standardized loading* dan diagonal dari matriks korelasi kekeliruan pengukuran (*matriks theta delta*). Kriteria ukuran ini nilainya lebih dari 0,5.

5.5.1 Analisis Path

Untuk menaksir pengaruh kelemahan struktural internal, koordinasi, dan sistem anggaran terhadap serapan anggaran, digunakan model sebagai berikut :

$$y_i = x_i' \beta + \varepsilon_i$$

Di mana :

y_i = Serapan Anggaran

x_i = Variabel Independen

Pengujian hipotesis akan menggunakan uji t-statistik dan pengujian F-statistik untuk menguji pengaruh variabel.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Profil Responden

Berdasarkan profil responden diketahui bahwa sampel yang valid dalam penelitian ini ialah sebanyak 716 dari total responden yang disurvei sebanyak 716. Dari data usia responden terlihat bahwa lebih dari 88,8% responden berusia di atas 25 tahun dengan kurang lebih 53.6% berusia di atas 36 tahun. Hal ini berarti bahwa dari segi usia responden dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal penyerapan keuangan di sektor publik khususnya di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dari masa kerja, sekitar 80% responden memiliki masa kerja di atas 5 tahun di bidang akuntansi sektor publik sedangkan sisanya sekitar 20% memiliki masa kerja 5 tahun ke bawah.

Berdasarkan teknik sampling, secara umum sampel bisa dianggap mewakili gambaran secara keseluruhan Kementerian Keuangan Indonesia karena sampel yang diambil merupakan sampel dari satuan kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang tersebar baik di pusat maupun di daerah yang merupakan instansi vertikal maupun non vertikal dari Eselon I Kementerian Keuangan. Responden yang diambil merupakan sampel dari 94 satuan kerja di beberapa wilayah Indonesia. Satker yang pegawainya paling banyak menjadi responden adalah dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena dari sisi jumlah SDM dan instansi vertikal, DJP paling besar.

Berdasarkan sebaran jabatan responden di masing-masing satuan kerja Kementerian Keuangan. Sebanyak 72.2% merupakan pelaksana langsung yang terkait dengan mekanisme penganggaran dan seluruh prosesnya termasuk masalah penyerapan anggaran. Sedangkan sekitar 27.8% responden berasal dari Eselon III/

Kepala Kantor/ Kabag/ Kabid, Eselon IV/ Kasie/ Kasubbag/ Kasubbid, Fungsional/ Widyaiswara/ Account Representative, dan Pengelola APBN/PPK/Bendahara. Dilihat dari sebarannya, seluruh responden sudah merepresentasikan seluruh elemen yang terkait dengan penyerapan anggaran.

Berdasarkan persepsi responden mengenai penganggaran dan masalah penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan, secara keseluruhan terlihat bahwa 85.8 % responden mengetahui dengan baik mengenai penganggaran dan penyerapan anggaran di sektor publik khususnya di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, seluruh jawaban responden dapat mewakili tujuan dan penelitian ini. Sekitar 14,2% responden tetap dimasukkan di dalam analisis karena pada dasarnya mereka mengetahui masalah penyerapan anggaran tetapi tidak mengetahui secara lebih dalam atau tidak terlibat secara langsung.

Berdasarkan persepsi responden, penyerapan anggaran dipersepsikan hampir sama antara optimal atau belum optimalnya penyerapan anggaran di satuan kerja. Hasil ini kurang baik karena dari internal Kementerian Keuangan sendiri menilai hampir 50% proses penyerapan anggaran yang ada sekarang belum optimal. Penyerapan anggaran yang optimal adalah penyerapan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan yang mencapai target sasaran yang telah ditentukan. Target ini meliputi target keuangan dan *target output* berdasarkan periode waktu tertentu. Penyerapan anggaran yang tidak optimal ini diukur dari tidak tercapainya realisasi keuangan dan/atau realisasi fisik/*output* yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Penyerapan anggaran yang belum optimal ini disebabkan oleh beberapa hal yang disebutkan pada jawaban pertanyaan berikutnya.

Beberapa alasan responden menilai kurang optimalnya penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan (tidak semua responden memberikan alasannya). Alasan-alasan tersebut sangat bervariasi tergantung pada situasi yang dihadapi oleh responden. Lima alasan yang paling banyak diberikan responden terkait dengan belum optimalnya penyerapan anggaran diantaranya (1) penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir periode/tahun (44.015%), (2) tidak konsistennya antara perencanaan dan realisasi (15.058%), (3) kurang baiknya perencanaan (6.564%), (4) banyaknya hambatan prosedural teknis dan keterlambatan lainnya (6.178%), dan (5) tidak sesuainya antara DIPA, kebutuhan, dan beban kerja.

Dari pendapat responden diketahui bahwa optimalisasi penyerapan anggaran di satuan kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Enam faktor utama yang berpengaruh pada optimalisasi penyerapan anggaran adalah perencanaan yang baik dan menyeluruh (47,544%), terdapatnya SDM yang memadai dan terampil di bidangnya (12,105%), pelaksanaan konsisten dengan aturan dan perencanaan yang telah dibuat (6,491%), perbaikan kesenjangan antara DIPA dan kebutuhan (4,386%), mekanisme pelaksanaan dan penyerapan anggaran yang efisien (3,684%), kepemimpinan (3,333%) dan sisanya sekitar 18% ialah dari berbagai faktor lainnya.

Alasan/kendala yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Didi Carsidiawan (2009) yaitu perencanaan anggaran yang tidak matang dan kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja. Alasan tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh World Bank (1998) yaitu perencanaan kegiatan yang baik.

6.2 Analisis Faktor

Sebelum analisis faktor dilakukan data ditransformasi dahulu dalam bentuk skala likert (merubah dari skala ordinal menjadi interval), sehingga dapat dianalisis secara parametrik seperti regresi. Dalam SPSS kita dapat melakukan secara langsung transformasi dalam analisis faktor. Skor faktor (*variabel laten*) yang terbentuk kemudian akan digunakan dalam analisis jalur.

6.2.1 Permasalahan Kelemahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian

Pengujian hipotesis dilakukan, sebagai berikut :

Ho : Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut

H1 : Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut

Kriteria dengan melihat probabilitas (signifikan):

p-value > 0.05 Ho tidak ditolak

p-value < 0.05 maka Ho ditolak

Dengan angka sig. (p-value) = 0.00 < 0.05 maka HO yang menyatakan sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut ditolak.

Lebih lanjut berdasarkan angka Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sebesar 0.848 dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel dan variabel sudah sangat baik untuk menaksir "Permasalahan Kelemahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian" (lihat tabel 6.1).

Berdasarkan teori yang dijelaskan

Tabel 6.1 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.848
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1.023E3
	df	21
	Sig.	.000

sebelumnya, dalam penelitian ini x11-x17 merupakan indikator-indikator yang membentuk satu variabel laten (satu faktor komponen). Selain alasan teori, hasil analisis total varians juga menunjukkan bahwa dengan menggabungkan x11-x17 menjadi hanya satu faktor (variabel laten) sudah memadai karena dapat mengestraksi varians sebesar 42,23%. Untuk faktor kedua, ketiga, dan selanjutnya tidak terdapat perbedaan ekstraksi yang signifikan.

Tabel 6.3 menjelaskan hubungan antara variabel laten "Permasalahan Kelemahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian" dengan indikator yang membentuknya. Dilihat dari skor faktor *loading*-nya, dapat diketahui bahwa seluruh indikator kecuali permasalahan sumber daya manusia memiliki faktor loading atau keeratan hubungan dengan variabel laten tersebut di atas 0,500. Hal ini sejalan dengan jawaban responden yang menilai sedikit sekali bahwa masalah sumber daya manusia sebagai penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran (hanya 4,633%). Dari hasil penelitian ini ternyata permasalahan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian lebih terkait dengan hal-hal yang bersifat struktural dan sistem. Sumber Daya Manusia tidak menjadi permasalahan dalam penyerapan anggaran karena sebagian besar responden berpendapat bahwa sumber daya manusia yang ada saat ini sudah memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Tabel 6.2 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.956	42.230	42.230	2.956	42.230	42.230
2	1.015	14.500	56.729			
3	.736	10.519	67.248			
4	.664	9.493	76.741			
5	.577	8.250	84.991			
6	.532	7.596	92.587			
7	.519	7.413	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabel 6.3 Faktor Loading: Permasalahan Kelemahan Struktural dan Sistemik

Indikator	Variabel	Factor Loading
X11	Proses Perencanaan, Pelaksanaan Kontrak dan Penagihan	0,739
X12	Perubahan Rencana/Rancangan dan variasi order	0,725
X13	Kelengkapan Persyaratan Dokumen	0,684
X14	Permasalahan Monitoring dan Evaluasi	0,745
X15	Permasalahan Reward and Punishment	0,576
X16	Permasalahan Penagihan dan Pembayaran	0,667
X17	Permasalahan Sumber Daya Manusia	0,291

6.2.2 Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor atau Kementerian Lain

Pengujian hipotesis dilakukan, sebagai berikut:

Ho : Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut

H1 : Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut

Kriteria dengan melihat probabilitas (signifikan):

p-value > 0.05 Ho tidak ditolak

p-value < 0.05 maka Ho ditolak

Dengan angka sig. (p-value) = 0.00 < 0.05 maka HO yang menyatakan sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut ditolak.

Lebih lanjut berdasarkan angka Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sebesar 0.661 (di atas

0,500) dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel dan variabel sudah sangat baik untuk menaksir "Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor atau Kementerian Lain".

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini x21-x23 merupakan indikator-indikator yang membentuk satu variabel laten (satu faktor komponen). Selain alasan teori, hasil analisis total varians juga menunjukkan bahwa dengan menggabungkan x21-x23 menjadi hanya satu faktor sudah memadai karena dapat mengestraksi varians sebesar 67,64%. Untuk faktor kedua dan ketiga tidak terdapat perbedaan ekstraksi yang signifikan.

Tabel 6.5 menjelaskan hubungan antara variabel laten "Permasalahan Kebijakan,

Tabel 6.4 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0,661
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	490,565
	df	3
	Sig.	0,000

Tabel 6.5 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.029	67.641	67.641	2.029	67.641	67.641
2	.593	19.771	87.412			
3	.378	12.588	100.000			

Tabel 6.6 Factor Loading: Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor

Indikator	Variabel	Factor Loading
X21	Konsistensi	0,802
X22	Sinkronisasi	0,874
X23	Koordinasi	0,789

Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor atau Kementerian Lain" dengan indikator yang membentuknya. Dilihat dari skor faktor loading-nya, dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki faktor loading atau keeratan hubungan dengan variabel laten tersebut di atas 0,500. Hal ini sejalan dengan jawaban responden yang menilai bahwa masalah konsistensi, koordinasi dan sinkronisasi merupakan hal utama dalam penganggaran dan penyerapannya. Konsistensi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan serta ketaatan pada peraturan/pedoman/rencana. Sedangkan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan instansi lain. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan melibatkan instansi lain seperti, unit atasan satuan kerja, pemerintah daerah, maupun pihak penyedia barang/jasa.

6.2.3 Permasalahan Sistem dan Otoritas Anggaran

Pengujian hipotesis dilakukan, sebagai berikut:

Ho : Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut

H1 : Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut

Kriteria dengan melihat probabilitas (signifikan):

p-value > 0.05 Ho tidak ditolak

p-value < 0.05 maka Ho ditolak

Dengan angka sig. (p-value) = 0.00 < 0.05 maka HO yang menyatakan sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut ditolak.

Lebih lanjut berdasarkan angka Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sebesar 0.501 (di atas 0,500) dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel dan variabel sudah sangat baik untuk menaksir "Permasalahan Kelemahan

Struktural dan Sistemik dari Kementerian".

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini x31-x32 merupakan satu variabel laten (satu faktor komponen). Selain alasan teori, hasil analisis total varians juga menunjukkan bahwa dengan menggabungkan x31-x132 menjadi hanya satu faktor sudah memadai karena dapat mengestraksi varians sebesar 73.215%. Untuk faktor kedua tidak terdapat perbedaan ekstraksi yang signifikan.

Tabel 6.9 menjelaskan hubungan

antara variabel laten "Permasalahan Sistem dan Otoritas Anggaran" dengan indikator yang membentuknya. Dilihat dari skor faktor loading-nya, dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki faktor loading atau keeratan hubungan dengan variabel laten tersebut di atas 0,500. Walaupun permasalahan sistem dan otoritas anggaran dinilai tidak terlalu penting dipersepsi oleh jawaban responden tetapi permasalahan ini tetap ke depannya harus tetap diperbaiki.

Tabel 6.7 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.501
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	172.512
	df	1
	Sig.	.000

Tabel 6.8 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.464	73.215	73.215	1.464	73.215	73.215
2	.536	26.785	100.000			

Tabel 6.9 Factor Loading: Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor

Indikator	Variabel	Factor Loading
X21	Manajemen Pengeluaran Dana	0,856
X22	Kegiatan Tambahan dari Anggota Legislasi	0,856

6.2.4 Serapan Anggaran

Pengujian hipotesis dilakukan, sebagai berikut:

Ho : Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut

H1 : Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut.

Kriteria dengan melihat probabilitas (signifikan):

p-value > 0.05 Ho tidak ditolak

p-value < 0.05 maka Ho ditolak.

Dengan angka sig. (p-value)= 0.00 < 0.05 maka HO yang menyatakan sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut ditolak.

Lebih lanjut berdasarkan angka Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sebesar 0.501 (di atas atau sama dengan 0,500) dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel dan variabel sudah sangat baik untuk menaksir "Serapan Anggaran".

Berdasarkan teori yang dijelaskan

sebelumnya, dalam penelitian ini x41-x2 membentuk satu variabel laten (satu faktor component). Selain alasan teori, hasil analisis total varians juga menunjukkan bahwa dengan menggabungkan x41-x42 menjadi hanya satu faktor sudah memadai karena dapat mengestraksi varians sebesar 87.359%. Untuk faktor kedua tidak terdapat perbedaan ekstraksi yang signifikan.

Tabel 6.12 menjelaskan hubungan

Tabel 6.10 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0,661
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	490,565
	df	3
	Sig.	0,000

Tabel 6.11 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.747	87.359	87.359	1.747	87.359	87.359
2	.253	12.641	100.000			

Tabel 6.12 Faktor Loading: Serapan Anggaran

Indikator	Variabel	Factor Loading
X41	Besarnya Serapan	0,935

6.2.5 Perencanaan Kegiatan

Pengujian hipotesis dilakukan, sebagai berikut:

Ho : Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut

H1 : Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut

Kriteria dengan melihat probabilitas (signifikan):

p-value > 0.05 Ho tidak ditolak

p-value < 0.05 maka Ho ditolak

Dengan angka sig.(p-value)=0.00 < 0.05 maka H0 yang menyatakan sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut ditolak.

Lebih lanjut berdasarkan angka Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sebesar 0.706

antara variabel laten "Serapan Anggaran" dengan indikator yang membentuknya. Dilihat dari skor faktor loading-nya, dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki faktor loading atau keeratan hubungan dengan variabel laten tersebut di atas 0,500. Hal ini sejalan dengan jawaban responden yang menilai bahwa masalah serapan anggaran merupakan masalah utama dalam penganggaran dan penyerapannya.

(di atas 0,500) dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel dan variabel sudah sangat baik untuk menaksir "Serapan Anggaran".

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini x51-x53 membentuk satu variabel laten (satu faktor komponen). Selain alasan teori, hasil analisis total varians juga menunjukkan bahwa dengan menggabungkan x51-x53 menjadi hanya satu faktor sudah memadai karena dapat mengestraksi varians sebesar 75.533% (lihat tabel 6.15). Untuk faktor kedua tidak terdapat perbedaan ekstraksi yang signifikan.

Tabel 6.15 menjelaskan hubungan antara variabel laten "Perencanaan Kegiatan" dengan indikator yang membentuknya. Dilihat dari skor faktor loading-nya, dapat

diketahui bahwa seluruh indikator memiliki faktor loading atau keeratan hubungan dengan variabel laten tersebut di atas 0,500. Hal ini sejalan dengan jawaban

responden yang menilai bahwa masalah perencanaan kegiatan merupakan salah satu masalah penting dalam penganggaran dan penyerapannya.

Tabel 6.13 Total Variance Explained

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.706
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	775.878
	df	3
	Sig.	.000

Tabel 6.14 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.266	75.533	75.533	2.266	75.533	75.533
2	.448	14.944	90.477			
3	.286	9.523	100.000			

Tabel 6.15 Faktor Loading: Perencanaan Kegiatan

Indikator	Variabel	Factor Loading
X51	Rencanan Serapan Anggaran	0,837
X52	Hubungan Kegiatan dengan Serapan Anggaran	0,901
X53	Perubahan serapan anggaran mengikuti perubahan kegiatan	0,869

6.3 Estimasi Model

6.3.1 Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menguji apakah data yang digunakan dalam analisis faktor dan path analysis ini valid dan akurat maka digunakan 2 (dua) pengujian dalam penelitian ini yaitu uji reliabilitas dengan Cronbach's Alfa dan validitas dengan metode korelasi. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alfa = 0.873 sudah di atas 0,500 sehingga data sudah reliable untuk digunakan di dalam analisis faktor dan analisis jalur (lihat tabel 4.24), sebagai berikut :

Begitu juga hasil pengujian validitas data pada table 6.17 menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki korelasi yang signifikan dengan total skor seluruh indikator yang membentuk suatu variabel laten pada tingkat kepercayaan sebesar 1% (p-value<1%). Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji reliabilitas dan validitas data, seluruh data dan variabel layak untuk digunakan lebih lanjut ke dalam analisis model penelitian.

Tabel 6.16 Uji Reliabilitas Data

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.873	.871	30

Tabel 6.17 Analisis Validitas

Indikator		Xt1	Xt2	Xt3	Xt4	Xt5
1	Pearson Correlation	.707**	.796**	.835**	.936**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
2	Pearson Correlation	.690**	.857**	.874**	.938**	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
3	Pearson Correlation	.675**	.833**			.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000			.000
4	Pearson Correlation	.719**				
	Sig. (2-tailed)	.000				
5	Pearson Correlation	.590**				
	Sig. (2-tailed)	.000				
6	Pearson Correlation	.663**				
	Sig. (2-tailed)	.000				
7	Pearson Correlation	.418**				
	Sig. (2-tailed)	.000				

Di mana:

- xt1 = Rata-rata skor indikator yang membentuk variabel laten Permasalahan Kelemahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian
 xt2 = Rata-rata skor indikator yang membentuk variabel laten Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor atau Kementerian Lain
 xt3 = Rata-rata skor indikator yang membentuk Perencanaan Kegiatan
 xt4 = Rata-rata skor yang membentuk variabel laten Serapan Anggaran
 xt5 = Rata-rata skor yang membentuk variabel laten Permasalahan Sistem dan Otoritas Anggaran
 1-7= Indikator terpilih yang digunakan masing-masing variabel laten.

6.3.2 Hasil Estimasi

Dari hasil analisis dengan menggunakan analisis jalur (analisis path) diperoleh analisis sebagai berikut :

$$\text{Serapan}_i = -0.116 * \text{Struktural}_i - 0.165 * \text{Perf}_i + 0.335 * \text{Plan}_i + 0.054 * \text{Otoritas}_i$$

t-stat (-2.57) (-4.50) (9.14) (1.22)

$$R^2 = 0.148$$

Di mana :

- i = Responden
 Serapan = Serapan Anggaran
 Struktural = Permasalahan Kelemahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian
 Perf = Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor atau Kementerian Lain
 Plan = Perencanaan Kegiatan
 Otoritas = Permasalahan Sistem dan Otoritas Anggaran.

Hasil analisis model menunjukkan bahwa masalah penyerapan anggaran di Satuan Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Struktural (Kelemahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian), variabel Perf (Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor atau Kementerian Lain), dan variabel Plan (Perencanaan Kegiatan) pada tingkat kepercayaan masing-masing sebesar 1% dan 5%. Sedangkan variabel otoritas (Permasalahan Sistem dan Otoritas Anggaran) tidak berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran pada tingkat kepercayaan 10%. Dari besaran koefisien regresi dapat diketahui bahwa perencanaan kegiatan (Plan) memiliki pengaruh yang paling besar terhadap serapan anggaran diikuti dengan Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Koordinasi dengan Sektor atau Kementerian Lain, dan Permasalahan Kelemahan Struktural dan Sistemik dari Kementerian. Hasil ini sesuai dengan jawaban responden pada tabel 6.8 bahwa untuk memperbaiki optimalisasi serapan anggaran di Kementerian Keuangan diperlukan perencanaan yang baik dan menyeluruh.

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa variabel struktural berpengaruh negatif terhadap variabel Serapan yang berarti bahwa semakin tinggi kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian keuangan maka semakin buruk serapan anggaran di kementerian tersebut. Permasalahan yang signifikan terkait dengan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian keuangan berdasarkan analisis faktor di antaranya:

- (1) proses perencanaan, pelaksanaan kontrak, dan penagihan,
- (2) perubahan rencana/rancangan dan variasi order,
- (3) kelengkapan persyaratan dokumen,

- (4) permasalahan monitoring dan evaluasi,
- (5) permasalahan reward dan punishment, dan
- (6) permasalahan penagihan dan pembayaran.

Kemudian variabel Perf juga berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran di mana semakin buruk sinkronisasi, kelengkapan, dan koordinasi dengan kementerian lain maka semakin buruk serapan anggaran. Buruknya sinkronisasi, kelengkapan, dan koordinasi dengan kementerian lain tersebut meliputi rencana kegiatan yang sering berubah-ubah dengan program kegiatan, sinkronisasi kegiatan yang buruk dengan unit/kementerian lain yang terkait, dan buruknya koordinasi perijinan antar unit dan kementerian terkait.

Terakhir, variabel perencanaan berpengaruh positif terhadap serapan anggaran di mana semakin baik perencanaan maka semakin baik pula serapan anggaran. Seluruh indikator yang dinilai dalam variabel perencanaan seluruhnya positif meliputi: sinkronisasi serapan anggaran dengan perencanaan, adanya hubungan antara besarnya serapan anggaran dengan kegiatan, dan perubahan serapan anggaran mengikuti perubahan kegiatan.

Hasil ini menunjukkan bahwa untuk memperbaiki permasalahan serapan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia ada tiga variabel prioritas yang harus diperbaiki secara berurut beserta indikator-indikator yang membentuknya, yaitu :

1. Perencanaan kegiatan dengan indikator meliputi :
 - (i) Sinkronisasi serapan anggaran dengan perencanaan,
 - (ii) Adanya hubungan antara besarnya serapan anggaran dengan kegiatan,

- (iii) Perubahan serapan anggaran mengikuti perubahan kegiatan
2. Permasalahan kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau kementerian lain dengan indikator perbaikan pada:
 - (i) Rencana kegiatan yang sering berubah-ubah dengan program kegiatan
 - (ii) Sinkronisasi kegiatan yang buruk dengan unit/kementerian lain yang terkait, dan
 - (iii) Buruknya koordinasi perijinan antar unit dan kementerian terkait
3. Kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian keuangan dengan indikator perbaikan pada:
 - (i) Proses perencanaan, pelaksanaan kontrak, dan penagihan
 - (ii) Perubahan rencana/rancangan dan variasi order
 - (iii) Kelengkapan persyaratan dokumen
 - (iv) Permasalahan monitoring dan evaluasi
 - (v) Permasalahan reward dan punishment
 - (vi) Permasalahan penagihan dan pembayaran.

Hasil analisis model ini sejalan dengan persepsi responden pada tabel 4.7-4.8 yang menilai bahwa faktor-faktor tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang penting untuk segera diperbaiki agar ke depan serapan anggaran dapat sesuai dengan rencana kegiatan.

7. KESIMPULAN

Hasil persepsi responden menunjukkan bahwa serapan anggaran masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya penyerapan anggaran masih menumpuk di akhir tahun, tidak

konsistennya antara perencanaan dan realisasi, kurang baiknya perencanaan, banyak hambatan prosedural teknis dan keterlambatan lainnya, serta masih banyak faktor-faktor yang harus menjadi bahan perbaikan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lebih jauh hasil analisis model penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi serapan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia diikuti oleh permasalahan kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau instansi lain, dan permasalahan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian. Oleh karena itu serapan anggaran dapat diperbaiki dengan memperbaiki perencanaan kegiatan yaitu membuat suatu perencanaan yang matang dan holistik serta memperbaiki permasalahan pada kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian dan juga memperbaiki kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau kementerian lain.

8. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, jika pembuat kebijakan dan pelaksana kegiatan melakukan perbaikan pada faktor-faktor yang berpengaruh pada penyerapan anggaran, realisasi penyerapan anggaran bisa ditingkatkan. Tentu saja hal tersebut membutuhkan komitmen bersama semua pihak terkait.

Penelitian ini masih dilakukan hanya di lingkungan satker Kementerian Keuangan, dan belum memperhatikan data awal mengenai capaian penyerapan anggaran masing-masing satker. Pertanyaan yang diajukan pun masih bersifat umum,

belum mendetail untuk setiap variabel. Sehubungan dengan hal tersebut disarankan untuk peneliti lain untuk meneliti dengan mengambil sampel yang lebih luas, tidak hanya Kementerian Keuangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke responden harus lebih spesifik dan mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics* 4nd Edition. New York: Mc Graw Hill
- Lüder, K.G. 1989. *Comparative Government Accounting Study: Interim Summary Report*. Revised Edition. Speyer: Speyerer Forschungsberichte No. 76. 1989
- Manasan, Rosario G., dan Mercado, Ruben G., *An Assesment of the Absorptive Capacity of Agencies Involved in The Public Works Sector*. Discussion Paper Series No. 2001-17
- Saleh, Zakiah. *Malaysian Governmental Accounting : National Context and User Orientation*, *International Review of Business Research Papers*. Vol. 3 No. 2. June 2007

Svensson, Jakob. *Absorptive Capacity and Disbursement Constraint*, *Institute for International Economic Studies*. Stockholm University. NHH. CEPR. March 2006

Sekaran, Uma. 2000. *Research Method For Business*, 3nd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Yamane, Taro. 1973. *Elementary Sampling Theory*. Prentice-Hall

<http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah> diakses tanggal 20 Juni 2010

<http://economy.okezone.com/read/2011/06/15/20/468844/penyerapan-anggaran-11-k-1-di-bawah-80> diakses tanggal 20 Juni 2010

<http://www.bappenas.go.id/node/116/2720/raker-iii-presiden-percepatan-penyerapan-anggaran-dan-sosialisasi-revisi-keppres-802003-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah>/diakses tanggal 20 Juni 2010